

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KOTA GORONTALO**  
(Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera di Kelurahan Tenda  
Kecamatan Hulonthalangi)

OLEH:

**DIANA SENDUK**  
**S.21.18.127**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GORONTALO

(Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera Di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulanthalagi )

Oleh :

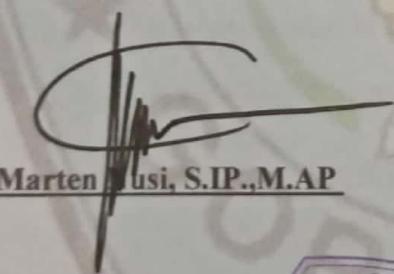
DIANA SENDUK

NIM: S2118127

#### SKRIPSI

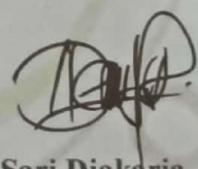
Telah disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
Gorontalo 08 Juni 2022

Pembimbing I



Marten Rusi, S.I.P., M.A.P.

Pembimbing II



Deliana Vita Sari Djakaria, S.I.P., M.I.P.



## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GORONTALO

(Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera Di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulanthalagi )

Oleh :

DIANA SENDUK

S2118127

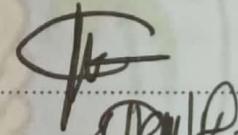
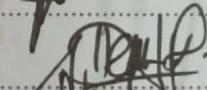
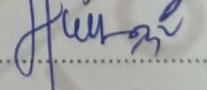
### SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji

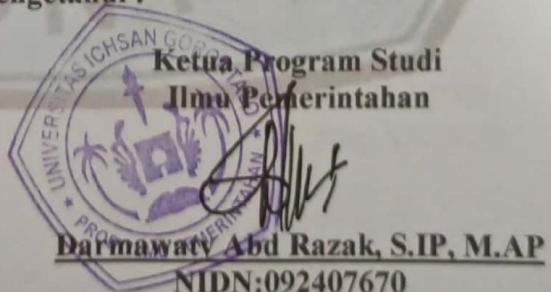
Pada Tanggal 08 Juni 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Marten Nusi, S.IP.,M.AP : 
2. Delianan Vita Sari Djakaria, S.IP.,M.IP : 
3. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP : 
4. Sandi Prahara, S.T.,M.Si : 
5. Swastiani Dunggio, S.IP.,M.Si : 

Mengetahui :



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Diana Senduk

NIM : S2118127

Judul Skripsi : KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**KOTA GORONTALO (Studi Terhadap Program Kartu  
Sejahtera Di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi)**

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli murni tulisan saya yang merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dan belum pernah dipublikasikan
3. Isi skripsi ini tidak terdapat gagasan maupun tulisan orang lain kecuali yang dicantumkan namanya.
4. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini , saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo

Demikian pernyataan ini saya buat.

Gorontalo, 12 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Diana Senduk

Nim: S2118127

## **MOTTO**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

**(QS.Al-Insyira :5-6)**

## **“Sitou Timou Tumou Tou”**

**( Manusia baru dapat disebut sebagai manusia,jika sudah dapat memanusiakan manusia.(Sam Ratulangi) )**

## **PERSEMBAHAN**

### **ALHAMDULILLAH**

Sujud syukur ku persembahkan kepada ALLAH yang maha pengasih dan penyayang,berkat rahmat dan nikmat-Nya sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Terimakasih kepada kedua orang tuaku Bapak Johny Senduk & Ibu Betiley Besouw yang selalu menyayangi ,mendukung dan mendoakanku

Terimakasih kepada Suamiku Helmy Anunu yang sangat aku sayangi.suami yang luar biasa dan sangat bertanggung jawab serta ujung tombak dalam menempuh pendidikan ini.

Terimakasih Kepada anak-anakku Igra,Deril&Dilan yang menjadi motivasiku untuk meneruskan pendidikan sampai ke jenjang ini.

Terimakasih kepada ibu mertuaku yang selalu menjaga anak-anakku saat aku pergi kuliah dan selalu mendukung aku.

Terimakasih kepada kakak perempuanku Siske Senduk yang paling berjasa dalam titik awal pendidikanku sejak kecil.

Terimakasih kepada seluruh dosen-dosen yang telah mendidik aku selama menempuh pendidikan di universitas Ichsan Kota Gorontalo

Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang hamper 4 tahun  
menempuh pendidikan ini serta menghadiakan gelar S.IP tepat di ulang tahunku  
yang ke-33

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadirat allah SWT, tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan dan melimpahkan rahmatnya dan telah melindungi penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Gorontalo.(Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan karena keterbatasan pengetahuan dan leterature yang penulis miliki, namun berkat bimbingan serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan trimaksih kepada yang terhormat :

1. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Dr. Arman, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP selaku ketua program study Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, dukungan yang luar biasa, wawasan, motivasi, saran, waktu dan segala keikhlasan membimbing penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Sandi Prahara, ST., Msi selaku sekretaris program study Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu pemgetahuan, saran,

kesabaran, pengertian, motivasi, dan kerelaan membagi ilmu kepada penulis, dari beliau penulis belajar akan rasa tanggungjawab dan amanah layaknya seorang guru terhadap anak didiknya.

5. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan dilingkungan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini mampu untuk menyempurnakan dalam penyusunan selanjutnya.

Gorontalo, 12 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                            | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>viii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                          | 4           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                        | 5           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                       | 5           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>               | <b>6</b>    |
| 2.1 Konsep Kebijakan Publik .....                  | 6           |
| 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....             | 6           |
| 2.1.2 Proses Kebijakan Publik.....                 | 6           |
| 2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan .....        | 9           |
| 2.2.1 Model-model Kebijakan Publik .....           | 13          |
| 2.3 Kerangka Pikir .....                           | 30          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>31</b>   |
| 3.1 Obyek Penelitian .....                         | 31          |
| 3.2 Jenis Penelitian .....                         | 31          |
| 3.3 Fokus Penelitian .....                         | 31          |
| 3.4 Lokasi Penelitian .....                        | 32          |
| 3.5 Informan Penelitian .....                      | 32          |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                  | 32          |
| <br>   |             |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>35</b>   |
| 4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....           | 35          |
| 4.2 Hasil penelitian.....                          | 35          |
| 4.3 Pembahasa.....                                 | 44          |
| <br>   |             |
| <br>   |             |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>            | <b>46</b>   |
| 5.1 Kesimpulan .....                               | 46          |
| 5.2 Saran.....                                     | 46          |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

**Diana Senduk.** S.21.18.127. Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Gorontalo (Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi).

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data. Adapun hasil penelitian implementasi program karti sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo adalah Program kartu sejahtera yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Gorontalo yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Wailkota Marten Taha, secara umum telah dapat memberikan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat. Permasalah yang ditemukan secara teknis belum terlalu Nampak mempengaruhi tujuan kebijakan. Karena prinsipnya program kartu sejahtera telah berjalan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Sebagai saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai bagian dari hal yang konstruktif adalah pemerintah Kelurahan Tenda harus memperhatikan usnur-unsur atau dimensi sebagai konsep implementasi kebijakan secara baik. Baik yang menyangkut penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat akan program kartu sejahtera. Perlunya meningkatkan personil atau apatur yang tidak saja mendukung pelaksanaan program kartu sejahtera, namun juga program pemerintah secara umum. Perlunya integrasi pendataan yang berksesuaian dengan pemerintahan diatasnya. Hal ini memudahkan dalam proses keakuratan data masyarakat miskin sebagai penerima program kebijaka sosial dan kesejahteraan dari pemerintah.

**Kata Kunci :** Implementasi Kabijakan, Kartu Sejahtera

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Program pembangunan di Indonesia secara umum telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat melalui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, berbagai inovasi dilakukan untuk memberikan dampak yang progresif bagi daerah, khususnya masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

Secara konkret urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam satu pasalnya mengatur tentang sifat wajib urusan pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah yang salah satunya menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat, baik dibidang pendidikan, maupun peningkatan ekonomi kehidupannya.

Kebijakan pembangunan yang menjadi domain pemerintah daerah telah banyak diatur dalam berbagai regulasi, baik undang-undang, maupun peraturan pemerintah yang kesemuanya mengarah pada proses pembangunan manusia untuk pengentasan kemiskinan dimasing-masing daerah.

Permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah universal yang terjadi pada seluruh daerah di Indonesia dan termasuk masalah yang penanganannya telah dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan melalui kebijakan

kesejahteraan masyarakat. Hampir pada setiap konsep penanganan kemiskinan di Indonesia selalu diikuti dengan program-program pendidikan dan pelatihan yang dapat merangsang, serta memotivasi masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun tidak sedikit juga hasil dari pelatihan dan pendidikan untuk mengedukasi masyarakat miskin tidak berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman sebagai latar pendidikan masyarakat yang beragam, serta apatisme masyarakat terhadap program-program yang bersifat edukasi.

Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin sebagai tindak lanjut dari program penganganan kemiskinan selalu menjadi masalah serius yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan konsep penganganan yang tepat, sehingga menyebabkan masyarakat miskin secara kuitaif terus mengalami peningkatan dan telah menjadi bagian dari pekerjaan rumah pemerintah yang akan terus diimplementasikan model-model pengangannya.

Pemerintah Kota Gorontalo adalah satu daerah yang serius melakukan upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, serta menjadikan Kota Gorontalo sebagai Kota yang SMART melalui kebijakan pembangunan yang telah digalakan sejak Sejak tahun 2014. Hal ini terlihat dengan dilaksanakannya program kartu sejahtera bagi masyarakat miskin di Kota Gorontalo yang tersebar pada semua Kecamatan yang ada.

Program yang digagas berdasarkan peraturan Walikota No 32 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program kartu sejahtera tersebut sejatinya adalah bagian dari upaya untuk memberikan akses layanan gratis bagi masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta program-program pelayanan lainnya yang dijagorkan dengan program gratis dari lahir sampai mati yang pada intinya program tersebut diharapkan akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Kota Gorontalo.

Sasaran program kartu sejahtera diperuntukan bagi warga miskin dengan delapan standar pelayanan yang dapat diperoleh oleh masyarakat penerima manfaat dengan kategori yang ditentukan melalui proses pendataan pada tingkat Kelurahan. Namun pada kenyataannya implementasi program tersebut, khususnya di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Secara umum dilapangan persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah Kota Gorontalo, lebih khusus pemerintah Kelurahan Tenda adalah target sasaran program yang tidak sepenuhnya tercapai. Ketidaktepatan sasaran penerima program salah satunya diakibatkan oleh tingkat pemahaman aktor pelaksana kebijakan yang kurang akan kriteria dan sasaran penerima kartu sejahtera, kurangnya sumber daya manusia yang melakukan validasi langsung dilapangan, ketidakjelasan standar operasional pelaksanaan oleh para aktor ditingkat bawah, serta adanya kasus pemotongan bagi masyarakat yang mengalami musibah kematian, dimana dana kematian dipotong dengan alasan iuran dan kompensasi peralatan duka.

Salah satu upaya strategis untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi suatu kebijakan adalah perlunya konsistensi secara konseptual tentang satu implementasi kebijakan baik dari sisi komunikasi dan koordinasi yang akan melahirkan pemahaman yang baik akan konsep pelaksanaannya. Dari uraian diatas, maka dipandang perlu untuk melahirkan satu konsep strategis implementasi kebijakan yang tepat, guna menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ada. Olehnya peneleti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Gorontalo (Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah implementasi program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthangi Kota Gorontalo.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat secara akademis**

Diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi upaya perkembangan ilmu pengetahuan, guna peneliti selanjutnya dalam melakukan pelenitian dalam bidang focus yang sama.

##### **2. Manfaat secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi konsep bacaan bagi pemerintah Kelurahan Tenda dalam pencapaian implementasi program kartu sejahtera guna kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

“Konsep United (dalam Wahab, 2012) menjelaskan tentang kebijakan sebagai sikap dari aktor, baik itu pejabat, kelompok, institusi pemerintahan.”

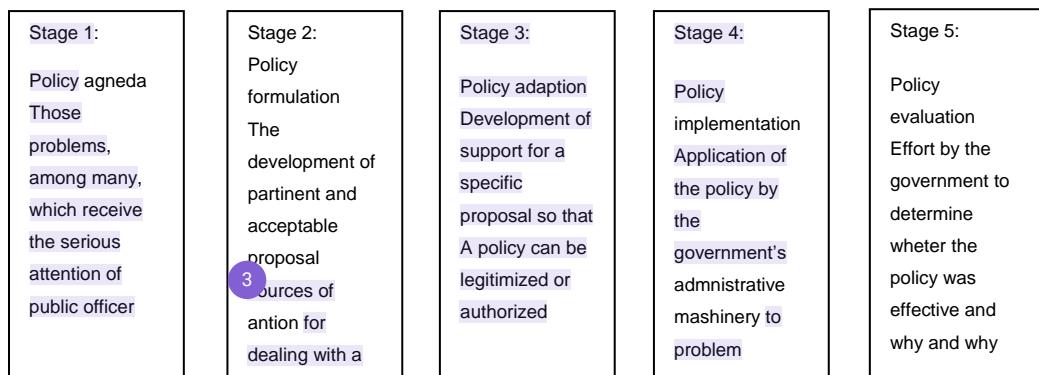
“Definisi lain oleh Dye (dalam Islamy, 2011) bahwa kebijakan adalah “apapun yang diputuskan dan serta dilakukan atau tidak dilakukan”. Menurut definisi ini bila pemerintah mengambil keputusan, berarti memilih sesuatu untuk memilih sesuatu.”

##### **2.1.2 Proses Kebijakan Publik**

“Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. Banyak para aktor yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor kebijakan, sampai aktor yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para aktor terhadap proses kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara

maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukanya menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru.”

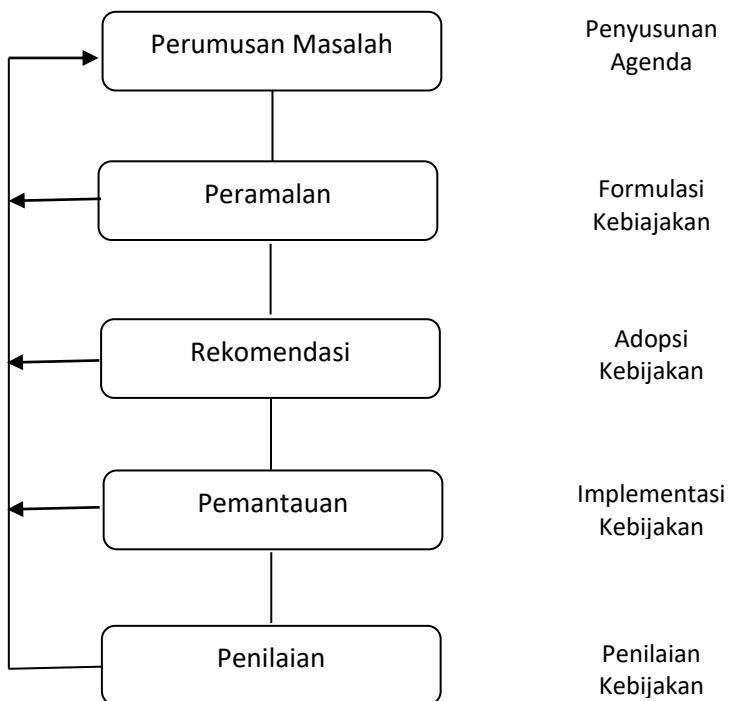
“Menurut para ahli kebijakan, sepertinya halnya James E. Anderson, David W. Brady dan Charles Bullock III (dalam Nugroho:2012) bahwa proses kebijakan yang normal dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nugroho, 2006

**Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.**

Tahapan dalam kebijakan publik akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut Dunn (dalam Nugroho : 2012) dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang saling bergantungan yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan angenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaitan tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25

**Gambar 2.2 Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe-tipe Pembuatan Kebijakan**

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masyarakat begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah – masalah yang ada, pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan fokus pembahasan

dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para perumus kebijakan.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam tahap ini berbagai alternatif penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk ditentukan, mana dari sekian alternatif penyelesaian masalah yang paling pantas dan terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran aktor akan sangat menentukan untuk bisa mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki.

## 2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk keputusan – keputusan (*decision*) oleh para aktor.

“Pelaksanaan kebijakan <sup>3</sup> berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2011). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.”

“Hal senada juga diungkapkan oleh Edward III Winarno (2012) yang mengatakan bahwa:

(implementasi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak).”

“Dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2012) dirumuskan secara sederhana bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menumbulkan dampak terhadap sesuatu, dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk peraturan yang diberlakukan baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan lainnya.”

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012) mendevenisikan secara terbatas bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintahan, maupun swasta untuk pencapaian tujuan dari yang sudah ditetapkan melalui kebijakan sebelumnya.

Berpijak pada pengertian diatas, maka hal yang berkaitan dengan teknis dan pengaturan dalam organisasi adalah sarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan publik. Implementasi kebijakan akan dapat dimulai jika tujuan-tujuan kebijakan telah melalui proses penetapan, rumusan program pelaksanaan telah dirancang dan anggaran sudah dialokasikan untuk kebijakan tersebut.

Pandangan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan Daniel A. Mazmanian (dalam Dunn, 2000), bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh orang per orang, pejabat atau kelompok

pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan pada kebijakan.

Menurut Udiji (dalam Agustino, 2008) bahwa implementasi suatu keputusan adalah sesuatu yang sangat urgen, dimana akan lebih penting dari perumusan keputusan kebijakan. Karena prinsip dasarnya adalah kebijakan yang tidak dilaksanakan hanya akan menjadi catatan kertas yang tidak berdampak apapun pada kepentingan publik.

Pemahaman lain tentang implementasi kebijakan juga disampaikan oleh Ripley (dalam Wiyoto, 2005, h. 33) yang mendefinisikan implementasi kebijakan publik, yaitu sejumlah tindakan yang diikuti pernyataan akan keinginan akan hasil dan tujuan suatu program yang diinginkan oleh para eksekutif.”

“Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*).”

“Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan bukanlah suatu aktivitas tunggal (*single action*). Implementasi kebijakan, pada hakikatnya lebih sebagai sebuah proses yang akan terdiri atas serangkaian aktivitas fungsional penting. Jones (dalam Wiyoto, 2005, h. 34) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokan kedalam 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu:

a) Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *translation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan).

b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*” (Penetapan atau melakukan pengaturan terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan hasil tertentu).

c) Penerapan (*Application*)

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan.”

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administrator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### **2.2.1 Model-model Impementasi Kebijakan Publik**

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori atau model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah – masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu. Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012) menjelaskan bahwa model adalah representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model ialah suatu proses pelaksanaan dari yang lain, yang dirumuskan untuk orisentasi tertentu.

Dalam kaitannya dengan kebijakan, Wahab (2012, h. 154) mengatakan bahwa seiring dengan semakin rumitnya masalah kebijakan dan juga semakin dalam analisis yang dibuat, maka semakin dibutuhkan suatu konsep atau kodel kebijakan yang relative operasionalnya untuk dapat menjelaskan diantara indicator yang dibutuhkan.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimuali dari rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini Nugroho (2012) menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat penjelasan akan model implementasi kebijakan, berikut ini akan dipaparkan jelaskan model implementasi kebijakan menurut para ahli kebijakan, diantaranya:

### **1. Model Van Metter dan Van Horn**

“Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya menitikberatkan pada hal-hal berikut :.

- a) *Policy Standard and Objectives* (5) (Ukuran dan Tuntutan Kebijakan)

“Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.”

- b) *Resources* (Sumber Daya)

“Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu.”

- c) *Interorganizational communication and enforcement activities* (8) (Komunikasi

antara organisasi dan aktivitas pelaksana)

“Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan kecil jarang terjadi.”

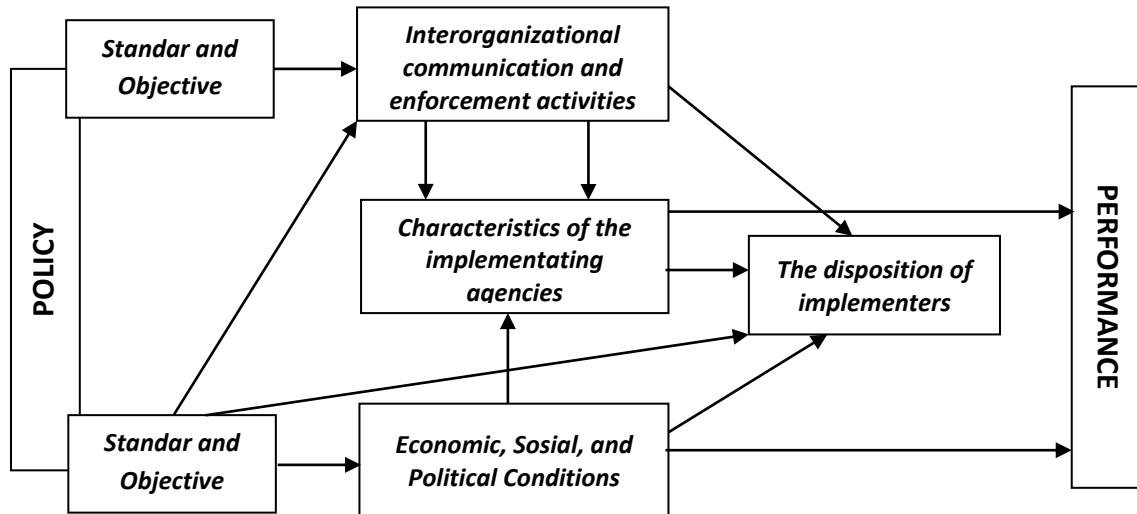
- d) *The characteristics of implementation of agencies* (Karakteristik Agen Pelaksana)
- e) *The economic, social and political environment* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik).

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

- f) *The Disposition or respons of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana)

<sup>12</sup> Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsig terhadap kelompok sasarn dan lingkungan.”

Model Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: D. Van Metter & C. Van Horn (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

**Gambar 2.3 A. Model of The Policy Implementation Process, D. Van Metter & C. Van Horn**

## 2. Model Mazmanian dan Sabatier

“Model implementasi kebijakan publik lain seperti dijelaskan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mengedepankan kemampuan melakukan identifikasi akan variable pendukng yang dapat mencapai tujuan kebijakan, diantaranya:

- 3)  
1) Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:

- a. Kesukaran Teknis

“Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan

indikator-indikator pengukuran kinerja,<sup>11</sup> serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.”

b. Keberagaman Perilaku yang diatur

“Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.”

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok saaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.

2) Keahlian keputusan melakukan strukturisasi proses implementasi kebijakan.

Perumus kebijakan memanfaatkan kewenangan yang melekat padanya untuk melakukan strukturisasi proses pelaksanaan melalui:

a. Pencermatan dan kejelasan jenjang tujuan inti yang akan dicapai.

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan alokasi sumberdaya

Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal

- d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan

- g. Akses formal pihak-pihak luar.

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- 3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Dukungan publik.

Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

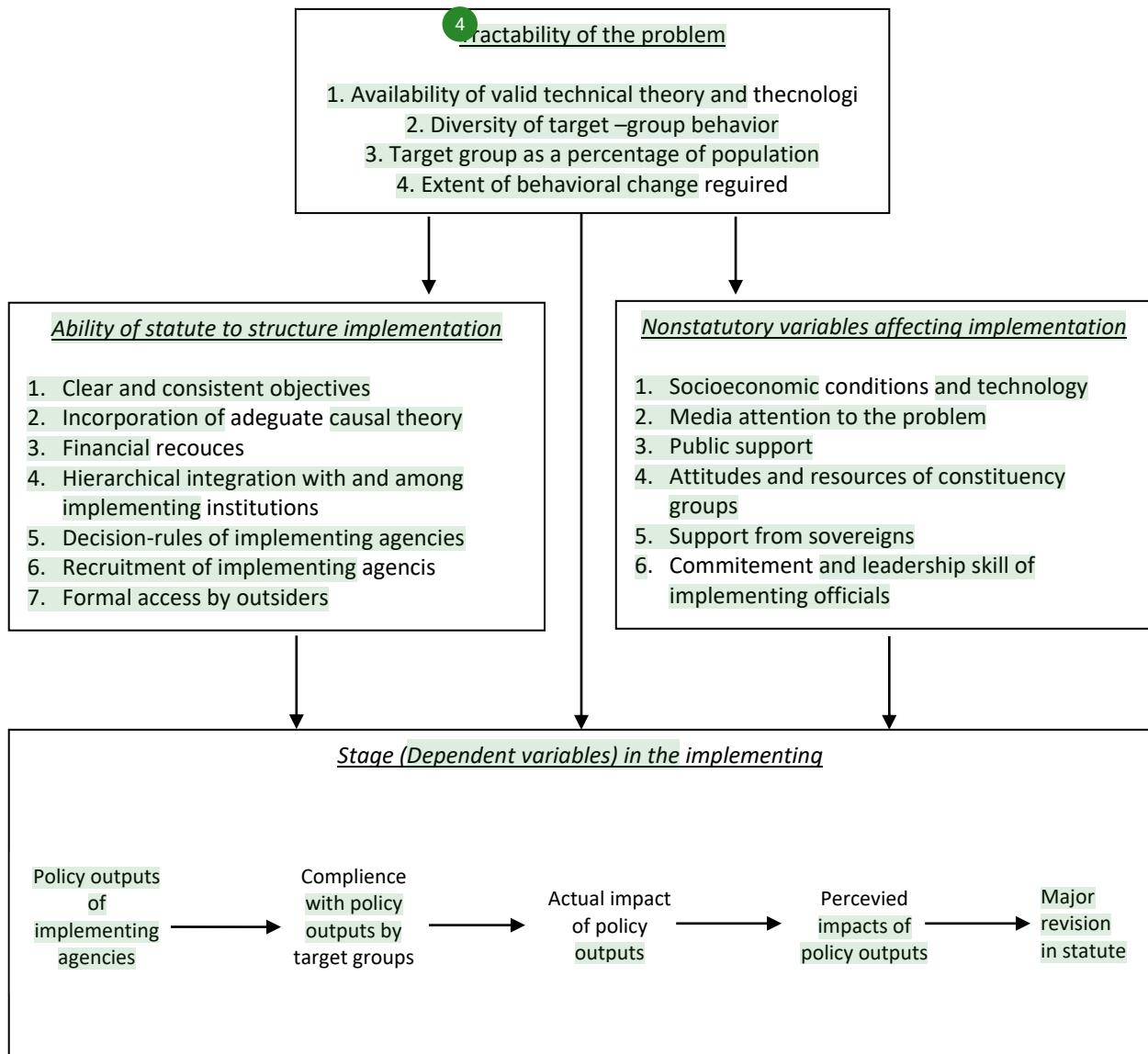
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

d. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.”

Variabel-variabel yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

**Gambar 2.4 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

### 3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model Edward III dalam menjelaskan konsep implementasi kebijakan dapat dilihat pada indicator dibawah ini :

<sup>1</sup>) Komunikasi

“Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentun saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.”

“Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.”

Winarno (2012, h. 179) menjelaskan <sup>2</sup> bahwa, faktor komunikasi lain dalam implementasi kebijakan adalah:

“Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan”.

1

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) “*Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran kemunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.”
- b) “*Kejelasan*; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.”
- c) “*Konsistensi*; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.”

## 2. Sumber daya

“Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika

para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud meliputi:"

- a) "Staf, Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan."
- b) "Informasi, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah."
- c) Wewenang, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik.

d) *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan.

Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Variabel diaposisi menurut edward III, yaitu:

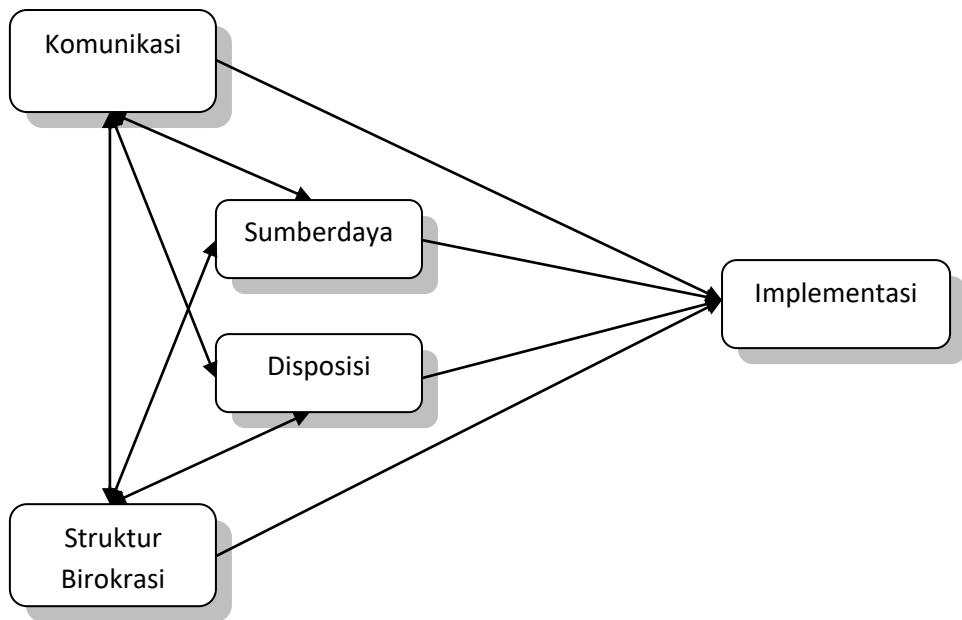
- a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b) *Insentif*<sup>2</sup>, Menurut edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manupulasi insentif dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

#### 4. Struktur Birokrasi

“Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Agustino, 2008, h. 153). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi), fragmentasi dimaksudkan sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan antara beberapa unit organisasi.”

Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008, h. 150)

**Gambar 2.5 Model *Direct and Indirect Impact on Implementation***  
**(Geoge Edward III)**

#### 4. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

“Model selanjutnya adalah model yang diungkapkan oleh Merilee S. Grindle. Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2011, h. 634) bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Menurut Grindle (dalam Agustino, 2008, h. 154) *implementability* itu terdiri dari *content of policy* (isi kebijakan) dan *Context of policy* (lingkungan kebijakan).

*Content of policy* (isi kebijakan) tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a) *Interest Affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan)

<sup>9</sup> *Interest affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.”

b) *Type of benefits* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan)

“Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan kebijakan harus membawa manfaat dan dampak positif dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.”

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).

“Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Isi kebijakan yang dijelaskan dalam poin ini adalah bahwa kebijakan harus bisa menjelaskan perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan dan mempunyai skala yang jelas.”

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Point ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

e) *Program implementer* (implementasi program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi berhasilnya suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

f) *Resources Committed* (sumberdaya-sumberdaya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan sumberdaya yang memadai yang dapat memperlancar kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sementara *context of policy* (konteks kebijakan) menyangkut hal-hal berikut:

- a) *Power* (kekuasaan), *Interest* (kepentingan) dan *Strategy of actor involved*  
10  
 (strategi aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan. Bila tidak diperhitungkan, maka kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan sulit terwujud.

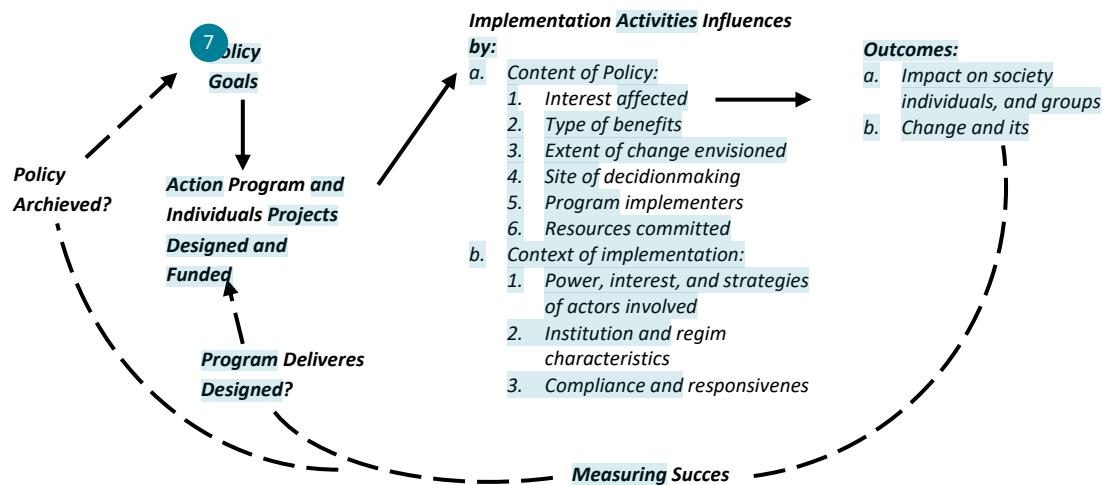
- b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut akan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan, sehingga disebutkan bagaimana 8 karakteristik dari suatu lembaga yang akan memperngaruhi suatu kebijakan.

- c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal selanjutnya penting dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari implementor kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.”

Model tersebut ditampilkan pada gambar 2.5 dibawah ini.

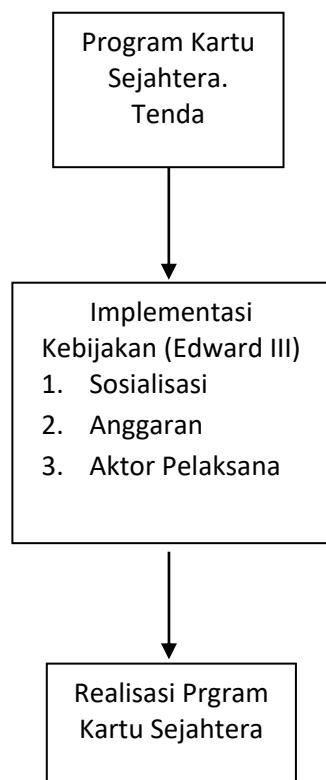


Sumber: Merilee S. Grindle (dalam Tachjan, 2006, h. 56)

**Gambar 2.6 Model pendekatan *Implementation as a Political and Administrative Process* (Marilee S. Grindle)**

### 2.3 Kerangka Pikir

Konsep kerangka piker disusun berdasarkan narasi yang dibangun pada latar belakang, rujukan teori serta hasil yang diharapkan akan menjadi luaran dari penelitian ini sebagaimana tujuan yang dinginkan. Olehnya secara praktis kerangka piker dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk bagan sebagaimana dibawah ini :



## BAB III

### OBYEK DAN METODE PENILITIAN

#### 3.1 Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Gorontalo dengan mengambil studi kasus pada pelaksanaan program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif/gambaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy Moleong (2014: 4), jenis penelitian kualitatif adalah sebagai model penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian, serta perilaku dari objek yang diamati selama penelitian.

#### 3.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Impelementasi Program Kartu Sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, yaitu :
  - a. Sosialisasi Program
  - b. Ketersediaan anggaran
  - c. Sarana dan prasarana
  - d. Ketersediaan aktor pelaksana

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangai, Kota Gorontalo.

### **3.5 Informan Penelitian**

Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam menentukan inofrman pada penelitian ini. Olehnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Lurah Tenda
- 2) Sekretaris Lurah
- 3) Kasie pembangunan
- 4) Aparat Kelurahan
- 5) Masyarakat.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data.**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya : wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana dibawah ini :

### **3.6.1 Wawancara**

Teknik wawancara didunakan untuk menjaring data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. wawancara di lakukan secara terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat dengan leluasa mengembangkan pertanyaan yang muncul.

### **3.6.2 Observasi**

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indra ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

### **3.6.3 Dokomentasi**

Pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder, kemudian mengumpulkannya, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian. sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi atas dasar referensi buku maupun naskah yang ada.

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model miles dan huberman sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2005) bahwa penelitian kualitatif proses analisis datanya mengedepankan analisis deskriptif, dengan beberapa tahapan, yaitu

### 1) Data *Reduction* (Reduksi data)

Upaya untuk memilih dan memilah data yang relevan atau sesuai dengan tema dan materi penelitian dengan cara merangkum, memilih hal-hal penting, serta melihat pada sisi focus utama dalam penelitian.<sup>6</sup>

### 2) Data *Display* (Penyajian data)

Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam arti pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

### 3) Verifikasi (Menarik kesimpulan).

Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan dilapangan dimana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tenda Kecamatan Hunthlangi adalah satu diantara Kelurahan yang ada di Kecamatan Hulonthalangi yang dulunya sebelum dimekarkan masuk sebagai bagian dari Kecamatan Kota Selatan. Kelurahan Tenda adalah Ibu Kotanya Kecamatan Hulonthalangi yang secara topografis Kelurahan Tenda terletak pada ketinggian 900 meter diatas permukaan laut. Dengan jumlah penduduk 6004 jiwa, laki-laki berjumlah 2992 jiwa dan perempuan 3012 jiwa.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan adalah bagian oenting dari sekian proses atau dimensi kebijakan publik. Sekalipun dalam konteks teoritis, banyak para ahli yang berbeda pendapat akan hal tersebut. Namun menurut Budy Winanro (2012) implementasi kebijakan adalah variabel utama dari sekian variabel kebijakan publik yang menjadi penentu berhasil tidaknya satu kebijakan.

Penenelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi kebijakan program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo menintik beratkan pada empat sub variabel impelemtasi kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh edwar III dalam widodo (2012), yaitu terbagi pada empat masing-masing sossialisasi program, ketersediaan anggaran, dan

sarana dan prasarana. Mengacu pada tiga indikator focus tersebut, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

#### **4.2.1 Sosialisasi Program**

Dalam temuan penelitian awal diperoleh informasi mengenai kurangnya pemahaman yang sistematis dan konprehensif akan kebijakan program kartu sejahtera, khususnya bagi mereka para aktor pelaksana kebijakan. Hal tersebut yang dikonfirmasi oleh peneliti melalui penelitian dan diperoleh data wawancara sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Lurah Tenda yang dilakukan pada tanggal Mei 2022 menyebutkan :

“Program kartu sejahtera adalah propgram unggungan dari bapak Walikota gorontalo yang dibalut dalam rumusan program SMART CITY. Yang kemudian salah satunya berkaitan dengan pemberian kartu sejahtera bagi masyarakat miskin di Kota Gorontalo. Kebijakan ini menurut saya sudah lama dipublikasikan melalui media. Untuk kelurahan Tenda sendiri saya sebelumnya melakukan rapat internal dengan aparat Kelurahah saya,bagaimana cara program ini benar-benar berdampak pada masyarakat. Upaya untuk sosialisasikan itu memang sudah kami lakukan, misalnya melalui pertemuan dengan masyarakat saat ada musyawarah di Kelurahan, serta melalui kepala-kepala Lingkungan”.

Pendapat yang sama peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan salah satu staf atau aparat pemerintah Kelurahan, yaitu Ibu TN pada tanggal Mei 2022

“Kalau ditanya sosialisasi itu sudah dilakukan ya. Banyak bentuknya, baik melalui forum musyawarah di Kelurahan, maupun kalau masyarakat datang meminta layanan di Kelurahan. Memang ada beberapa masyarakat yang datang kompleks akan hal tersebut, mereka tidak dapat info untuk program kartu sejahtera. Namun kami disini tetap berpedoman pada data miskin yang sudah bernaht diverifikasi sebelumnya.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada dilungkungan lima Kelurahan Tenda pada tanggal mei 2022 juga menjelaskan bahwa :

“Saya termasuk penerima program kartu sejahtera itu, katanya ada layanan gratis dari lahir sampai mati dengan delapan layanan publik yang gratis. Saya cuma dikasih tau dapat masuk sebagai penerima kartu sejahtera untuk layanan gratis oleh Kelurahan. Tidak ada penjelasan mengenai manfaatnya apa, apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk memanfaatkan kartu itu, tidak ada penjelasan”.

Sekretaris Kelurahan Tenda yang juga diwawancarai menjelaskan tentang sosialisasi program kartu sejahtera di Kelurahan tenda, ketika diwawancarai pada tanggal mei 2022 :

“Program kartu sejahtera ini sebetulnya hampi sama dengan program-program untuk masyarakat lainnya. Ini sudah sejak lama digulirkan. Model sosialisasi kami lakukan dengan cara menyampaikan ke setiap warga yang berhak menerima kartu itu. Mengingat tidak semua masyarakat sebagai penerima kartu itu. Hanya terbatas pada kategori yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Kami ini hanya meneruskan saja ke masyarakat”.

Salah satu warga lainnya Kelurahan Tenda yang diwawancarai menyebutkan :

“Ya kami disampaikan oleh petugas dari kelurahan, bahwa kami memperoleh kartu sejahtera dari Walikota. Katanya itu program pak Wali dan nama kami masuk sebagai salah satu penerima. Katanya program gratis untuk semua layanan warga. Termasuk katanya ada sampai matipun warga diberikan biaya duka sebesar dua juta rupiah”.

Uraian dari hasil wawancara tentang sosialisasi program kartu sejahtera di Keluraha Tenda sebagaimana dijelaskan di paragraph sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi program kartu sejahtera, lebih khusus berkaitan dengan factor sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah Keluraha Tenda. Model penyampaian informasi program tersebut berdasarkan hasil wawancara dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui penyampaian langsung kepada masyarakat penerima kartu sejahtera, maupun melalui pertemuan dilingkungan masing-masing melalui para ketua-ketua RT. Penrinsip dasar dari program tersebut adalah bagia dari kewenangan pemerintah daerah dalam menyampaikan ke masyarakat Kota Gorontalo, karena program tersebut adlaah bagian dari komitmen Walikota Gorontalo dimasa kepemimpinanya.

#### **4.2.2 Ketersediaan Anggaran**

Dalam wawancara dengan beberapa informan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

Wawancara dengan Lurah Kelurah Tenda pada Mei 2022 :

“Kalau ditanya anggaran itu adalah kewenangan pemerintah Kota Gorontalo, tidak ada kewenangan anggaran di Kelurahan. Kami ini hanya menjalankan fungsi administrasi, artinya ketika itu telah diputuskan dan itu bagian dari program pemerintah daerah, maka kami di Kelurahan hanya menjalankan teknis admainistrasinya. Saya kira kalau anggaran pasti sudah direncanakan dan disipakn oleh pemerintah daerah, buktinya sampai dengan saat ini masyarakat penerima kartu sejahtera tetap terlayani dengan baik”.

Sekretrais Kelurahan tenda ketika ditanya akan anggaran kartu sejahtera menjelaskan :

“Anggaran program kartu sejahtera itu di kelurahan tidak mengelolanya, itu ada di Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Kami hanya mengeksekusi saja, kita disni hanya mengelola data penerima program kartu sejahtera.”

Kepala seksi pemerintahan Kelurahan Tenda menjelaskan mengenai anggaran program kartu sejahtera pada Mei 2022:

“Ya saya sejalan dengan pak Lurah, bahwa tidak ada kelurahan mengelola anggarannya. Anggaran itu dari pemerintah Daerah langsung. Mereka yang mengelolanya sampai pada pencairan. Bahkan untuk urusan administrasi kami hanya sebagai pengantar saja, urusan memasukan itu ada dibagian kesra pemkot untuk proses pengurusannya dan pencairannya”.

Untuk mengkonfirmasi hasil wawancara dengan para informan yang ada di Kelurah Tenda terkait anggaran, maka kemudian peneliti melakukan wawancara bersama salah satu staf dibagian bidang kesejahteraan sosial (Kesra) Pemerintah Kota Gorontalo :

“Untuk anggaran pada pelaksanaan program kesejahteraan di Kota Gorontalo itu semuanya bersumber dari APBD Kota Gorontalo, kecuali program-program yang langsung dari pusat ya. Seperti PKH, dan program bantuan sosial dari kementerian. Program kartu sejahtera di Kota Gorontalo itu memang menjadi kewenangan daerah. Nanti kami dari sini menunggu infor dari Kelurahan masing-masing ketika ada masyarakat yang meninggal misalnya dan itu mendapat dana kematian sebesar dua juta rupiah, nah itu ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi, Kelurahan mengeluarkan suratnya dan diteruskan pada kami di Kesra”.

Berdasarkan hasil wawancara tentang masalah anggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masalah anggaran dalam pelaksanaan program adalah bagian lain dari kewenangan pemerintah daerah Kota Gorontalo yang besaran anggarannya disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan kartu sejahtera oleh masyarakat pada fasilitas layanan publik. Anggaran yang disediakan tersebut bersumber dari APBD Kota Gorontalo yang digunakan untuk membiayai program-program yang masuk dan terfaer dalam kartu sejahtera. Pemerintah Kelurahan tidak mengelola langsung anggaran, pemerintah Kelurahan hanya mengelola data penerima dan teknis administrasi pelaksanaannya. Informan dari pemerintah Kelurahan memiliki persepsi yang sama dalam memandang pembiayaan program kartu sejahtera, dimana tidak ada hal menjadi kewenangan anggaran bagi pemerintah Kelurahan.

#### **4.2.3 Dukungan sarana dan prasarana**

Salah satu fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program kartu sejahtera di Kelurahan tenda Kota Gorontalo. Dari proses wawancara ditemukan beberapa data wawancara sebagai berikut :

Wawancara dengan Lurah Tenda pada Mei 2022 tentang dukungan sarana dan prasarana program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda:

“Sarana dan prasarana layanan masyarakat yang terkafer dalam kartu sejahtera secara umum memang sudah lama tersedia. Misalnya dalam hal pelayanan di Kelurahan ini, masyarakat yang datang meminta layanan administrasi, kami melayaninya dan fasilitas pun cukup tersedia. Inimnya kalau ditanya tentang sarana pendukung cukup tersedia menurut saya”.

Sekretaris Kelurahan Tenda juga menyampaikan dalam wawancara :

“Sarana penunjang sebenarnya sudah memang tersedia. Pemerintah Kota Gorontalo sudah menyiapkannya. Kami di Kelurahan pun dalam pelayanan kepada masyarakat dengan sarana layanan yang ada. Surat-menyerat yang berhubungan dengan masalah kartu sejahtera yang diminta oleh masyarakat selalu kami siapkan. Fasilitas sosial juga tersedia, layanan kesehatan dan masih ada lagi fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat penetima kartu sejahtera”.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu aparat di Kelurahan Tenda pada Mei 2022 menjelaskan bahwa :

“Pelayanan kartu sejahtera khusus di Kelurahan Tenda sepengetahua saya selama ini berjalan baik. Administrasi yang merupakan ukuran sarana penunjang tersedia di kantor ini. Karena memang hubungan pemerintah Kelurahan itu seputar penyediaan administrasi, kalau untuk sarana fisik lainnya itu sudah kewenangan pemerintah Daerah”.

Berdasarkan uraian informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan akan sarana dan prasarana pada program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda tidak terlepas dari kebijakan penyediaan saran oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo. Sarana yang dimaksud yang disediakan oleh pemerintah Kelurahan Tenda adalah hal yang berkaitan dengan fasilitas pendukung secara administratif. Dalam konteks dimana masyarakat yang menggunakan kartu sejahtera, proses birokrasinya melalui surat keterangan dari pemerintah Kelurahan, olehnya pemerintah Kelurahan memfasilitasi secara administrasi sebagai bagian dari dukungan sarana penunjang untuk pelaksanaan pemanfaatan kartu sejahtera. Untuk sarana yang bersifat fisik, seperti bangunan, prinsipnya sudah terintegrasi dengan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Gorontalo.

#### 4.2.4 Aktor Pelaksana

Setelah rumusan kebijakan dibuat atau satu program telah ditetapkan, implementasi menjadi salah satu dimensi penting penentu tujuan kebijakan. Proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sama-sama membutuhkan aktor. Dalam hal implementasi kebijakan, aktor pelaksana adalah indicator keempat yang akan menjadi penentu dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan dalam wawancara tentang ketersediaan aktor pelaksana program di Kelurahan Tenda, yaitu :

Wawancara dengan Lurah Tenda pada Mei 2022 :

“Kalau kelurahan itu sebagai pelaksana dalam hal pendataan dan administrasi, misalnya pendataan penerima kartu sejahtera, serta proses pengurus surat keterangan sebagai syarat pemmanfaatn layanan melalui kartu sejahtera. Perangkat kelurahan semuanya kami gerkan untuk melibatkan diri dalam proses pelaksanaan program tersebut. Kami ini hanya terkendela dalam proses pendataan. Mestinya dilakukan verifikasi factual tentang penerima secara langsung, namun kami sadari itu semua tidak berjalan dengan baik, masih ada laporan yang saya terima dari masyarakat bahwa pendataan tidak sesuai dan petugas yang datang juga tidak turun katanya”.

Sekretaris Kelurahan Tenda ketika diwawancarai terkait ketersediaan aktor pelaksana program di Kelurahan tenda menjelaskan :

“Kami punya aparat sampai ketingkat lingkungan, ada ketua RT dan RW, maka dalam hal kesiapan aktor pelaksana, sebetulnya sudah siap kami, hanya memang kami ini memang tidak sebanyak aparat pemerintahan lainnya. Program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda sudah berjala dengan baik menuju saya, mengingat sejak awal digulirkan banyak masyarakat yang sudah memanfaatnkan program tersebut”.

Sejalan dengan dua informan sebelumnya, masyarakat yang dikonfirmasi pada mei 2022 mengenai adanya aparat kelurahan yang turun melaksanakan sosialisasi tentang program kartu sejahtera :

“Kalau dilingkungan saya hal ini memang menjadi masalah, karena tidak satupun dri kelurahan datang menenmui masyarakat untuk menyampaikan prgram tersebut. Terkesan hanya ditentukan sepihak dan tiba-tiba ada orang yang sudah ditentukan berhak dapat, padahal tidak layak. Ketika dikonfirmasi kepada kepala lingkungan, katanya tidak mengetahui, katanya lagi aparat kelurahan punya tugas itu, bukan dia”.

Masyarakat lauinnya yang juga dikonsrimasi pada Mei 2022 lewat wawancara menjelaskan :

“Program kartu sejahtera ini hanya beken kecemburuan dimasyarakat. Ada yang dapat, ada juga yang tidak, mereka aparat kelurahan itu tidak ada orang apa mau datang turun kemasyarakat untuk menjelaskan program itu. Bahkan kalau saya datang ke Kelurahan, pelayanannya pun kurang bagus dan lambat”

Melalui informasi tersebut diatas, dimana para informan kuranya kesesuaian dalam memberikan padangan dan penjelasan akan ketersediaan aktor pelaksana dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa aktor pelaksana dilapangan untuk Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi secara kuantitatif masih perlu mendapat perhatian serius dari Lurah atau pemerintah diatasnya untuk ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan setiap kebijakan. Masyarakat tidak merasakan kehadiran aparat yang dapat memberikan penjelasan untuk program juga dinilai menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program.

### 4.3 Pembahasan

Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari faktor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian public akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerakkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ketingkat pemerintahan dibawahnya. Namun untuk melihat apakah adanya keberhasilan atau tercapainya tujuan kebijakan perlu ada indikator jelas dalam pelaksanaannya.

Program kartu sejahtera yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Gorontalo yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Wailokota Marten Taha, secara umum telah dapat memberikan dampak yang baik

pada kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan hasil temuan penelitian dari keempat indikator fokus penelitian yang dipakai untuk mengkaji pemasalahan pelaksanaan program kartu sejahtera, program tersebut dapat dinilai seudah berjalan baik, seperti pada sosialisasi program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Tenda melalui pelibatan aparat di Kelurahan, hal ini penting diperhatikan dengan baik, karena ketidak pahaman dari aparat dan masyarakat sebagai penerima program akan berdampak pada kesalahpahaman secara teknis dan bahkan menyebabkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Selain itu kurangnya aparatur yang terlihat dalam hasil penelitian guna mendukung pelaksanaan program kartu sejahtera menjadi bagian penting yang akan menggagalkan tujuan kebijakan.

Sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana program menurut Edward III (dalam Wnarno 2012) adalah indikator utama dari variabel sumber daya yang akan menggerakan proses pelaksana kebijakan. Olehnya tidak hanya dituntut memahami akan konsepsi program, namun secara kuantitas ketersedian aparat pemerintah sebagai aktor dilapangan juga secara kuantitas harus ditingkatkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dijelaskan pada sub bab ini mengenai implementasi program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo adalah Program kartu sejahtera yang menjadikan salah satu program unggulan pemerintah Kota Gorontalo yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Wailkota Marten Taha, secara umum telah dapat memberikan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ditemukan secara teknis belum terlalu Nampak mempengaruhi tujuan kebijakan. Karena prinsipnya program kartu sejahtera telah berjalan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima.

#### 5.2 Saran

Sebagai saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai bagian dari hal yang konstruktif adalah pemerintah Kelurahan Tenda harus memperhatikan unsur-unsur atau dimensi sebagai konsep implementasi kebijakan secara baik. Baik yang menyangkut penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat akan program kartu sejahtera. Perlunya meningkatkan personil atau apatur yang tidak saja mendukung pelaksanaan program kartu sejahtera, namun juga program pemerintah secara umum. Perlunya integrasi pendataan yang

berksesuaian dengan pemerintahan diatasnya. Hal ini memudahkan dalam proses keakuratan data masyarakat miskin sebagai penerima program kebijakan sosial dan kesejahteraan dari pemerintah.



Suasana di kantor kelurahan tenda.



Wawancara dengan ibu sekretaris kantor kelurahan tenda tentang penerapan kartu sejahtera di kelurahan tenda.



Wawancara dengan staf kantor kelurahan tenda mengenai kartu sejahtera



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4077/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Lurah Tenda

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Diana Senduk

NIM : S2118127

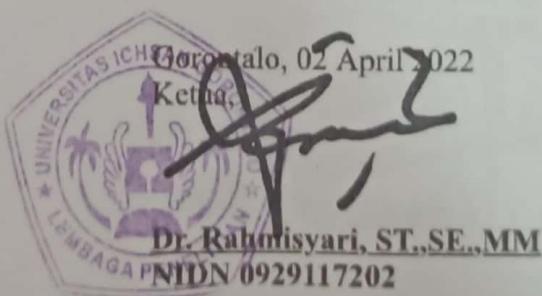
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTALANGI  
KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KOTA GORONTALO (STUDI TERHADAP  
PROGRAM KARTU SEJAHTERA DI KELURAHAN TENDA  
KECAMATAN HULONTALANGI)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KOTA GORONTALO  
KECAMATAN HULONTALANGI  
KELURAHAN TENDA  
JALAN YOS SUDARSO NO 120 TELP (0435) 824870

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 474.1/PEM/KT/31

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHINDRAWATY MANTU, A.Md**

Jabatan : **SEKERTARIS**

Menerangkan kepada

a. Nama : **DIANA SENDUK**

b. NIM : **S2118127**

c. Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik**

d. Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Sesuai dengan permohonan izin Penelitian dengan Nomor : 4077/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022 yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthangi Kota Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan di pergunakan Syarat untuk ujian Skripsi.



## PAPER NAME

SKRIPSL\_S2118127\_DIANA SENDUK\_IMP  
LEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERA  
AN MASYARAKAT KOTA GORONTALO (S  
tudi

## AUTHOR

S2118127 DIANA SENDUK

## WORD COUNT

7363 Words

## CHARACTER COUNT

50872 Characters

## PAGE COUNT

50 Pages

## FILE SIZE

113.5KB

## SUBMISSION DATE

Jun 10, 2022 10:19 PM GMT+8

## REPORT DATE

Jun 10, 2022 10:21 PM GMT+8

**• 20% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

**• Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**20% Overall Similarity**

10 sources found in the following databases:

• 20% Internet database

• Crossref database

• 1% Submitted Works database

• 6% Publications database

• Crossref Posted Content database

**SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   | SOURCE                         | PERCENTAGE |
|---|--------------------------------|------------|
| 1 | 123dok.com                     | 8%         |
|   | Internet                       |            |
| 2 | core.ac.uk                     | 2%         |
|   | Internet                       |            |
| 3 | repository.ub.ac.id            | 2%         |
|   | Internet                       |            |
| 4 | scribd.com                     | 2%         |
|   | Internet                       |            |
| 5 | eprints.stialanmakassar.ac.id  | <1%        |
|   | Internet                       |            |
| 6 | text-id.123dok.com             | <1%        |
|   | Internet                       |            |
| 7 | ifrnd.org                      | <1%        |
|   | Internet                       |            |
| 8 | repository.fisip-untirta.ac.id | <1%        |
|   | Internet                       |            |

|    |                        |     |
|----|------------------------|-----|
| 9  | kesambett.blogspot.com | <1% |
| 10 | Internet               |     |
| 11 | eprints.untirta.ac.id  | <1% |
| 12 | digilib.uin-suka.ac.id | <1% |
| 13 | Internet               |     |
| 14 | neliti.com             | <1% |
| 15 | Internet               |     |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001  
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp ( 0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 110/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP  
NIDN : 0924076701  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : DIANA SENDUK  
NIM : S2118127  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Gorontalo (Studi Terhadap Program Kartu Sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar **20%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Juni 2022

Tim Verifikasi

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP  
NIDN. 0924076701

Mengetahui  
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0913078602

Terlampir :

## ABSTRAK

**DIANA SENDUK. S2118127. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO (STUDI TERHADAP PROGRAM KARTU SEJAHTERA DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTHALANGI)**

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program kartu sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data. Adapun hasil penelitian implementasi program karti sejahtera di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo adalah Program kartu sejahtera yang menjdi salah satu program unggulan pemerintah Kota Gorontalo yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Wailkota Marten Taha, secara umum telah dapat memberikan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat. Permasalah yang ditemukan secara teknis belum terlalau Nampak mempengaruhi tujuan kebijakan. Karena prinsipnya program kartu sejahtera telah berjalan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Sebagai saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai bagian dari hal yang konstruktif adalah pemerintah Kelurahan Tenda harus memperhatikan usnur-unsur atau dimensi sebagai konsep implementasi kebijakan secara baik. Baik yang menyangkut penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat akan program kartu sejahtera. Perlunya meningkatkan personil atau apatur yang tidak saja mendukung pelaksanaan program kartu sejahtera, namun juga program pemerintah secara umum. Perlunya integrasi pendataan yang berksesuaian dengan pemerintahan di atasnya. Hal ini memudahkan dalam proses keakuratan data masyarakat miskin sebagai penerima program kebijaka sosial dan kesejahteraan dari pemerintah.

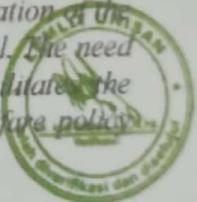
Kata kunci : implementasi kabijkan, kartu sejahtera



## **ABSTRACT**

### **DIANA SENDUK. S2118127. THE IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY WELFARE POLICY IN GORONTALO CITY (A STUDY OF THE PROSPERITY CARD PROGRAM IN TENDA URBAN VILLAGE, HULONTHALANGI SUBDISTRICT)**

*This study aims to determine and analyze the implementation of the Prosperity Card program in Tenda Urban Village, Hulonthalangi Subdistrict, Gorontalo City. This study employs a qualitative method. The data collection techniques use interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is the interactive type. The results of the study indicate that the implementation of the Prosperity Card program in Tenda Urban Village, Hulonthalangi Subdistrict, Gorontalo City, is the Prosperity Card Program, which is one of the flagship programs of the Gorontalo City government. It has been implemented under the leadership of Mayor Marten Taha. In general, it has been able to have a good impact on people's lives. The problems found technically did not seem to affect policy objectives. It is because the principle of the Prosperous Card program has been running and has been used by the recipient community. As suggestions and recommendations, the Tenda Urban Village government must pay attention to the elements or dimensions as a concept of good policy implementation, either the delivery of messages or information to the public or the Prosperity Card program. It is necessary to increase personnel or apparatus by not only supporting the implementation of the Prosperity Card program but also the government programs in general. The need for data integration should follow the previous government. It facilitates the process of accurate data on the poor as recipients of social and welfare policy programs from the government.*



*Keywords:* policy implementation, prosperity card

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Diana Senduk  
NIM : S2118127  
Tempat /Tgl Lahir : Tondano 12 Juni 1989  
Nama Ayah : Johny Senduk  
Nama Ibu : Betiley Besouw  
Alamat : Jln Brawijaya Kelurahan Tenda Hulondalangi  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1  
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo  
(Studi Terhadap Program Kartu Sejatera di di Kelurahan Tenda  
Kecamatan Hulondalagi )



| SEKOLAH                             | MASUK/LULUS |
|-------------------------------------|-------------|
| SDN 4 TONDANO                       | 1995-2001   |
| SMP NEGERI 1 KOTAMOBAGU             | 2001-2004   |
| SMA KATOLIK THEODORUS<br>KOTAMOBAGU | 2004-2007   |
| UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO        | 2018-2022   |